

7-11-2022

## Keterpilihan Dinasti Politik pada Pilkada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2017-2020

Theresia Wahyuni Yuliantiningsih

*Program Studi Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, theresia.wahyuni@ui.ac.id*

Vid Adrison

*Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Kampus UI Depok 16424, Jawa Barat, Indonesia, vadrison@yahoo.com*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jke>



Part of the [Economics Commons](#), [Public Affairs, Public Policy and Public Administration Commons](#), and the [Urban Studies and Planning Commons](#)

---

### Recommended Citation

Yuliantiningsih, Theresia Wahyuni and Adrison, Vid (2022) "Keterpilihan Dinasti Politik pada Pilkada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2017-2020," *Jurnal Kebijakan Ekonomi*: Vol. 17: Iss. 2, Article 4.

DOI: 10.21002/jke.2019.08

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol17/iss2/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Kebijakan Ekonomi by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## Keterpilihan Dinasti Politik pada Pilkada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2017-2020

Theresia Wahyuni Yuliantiningsih<sup>a\*</sup>, & Vid Adrison<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

<sup>b</sup> Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

### Abstract

*The purpose of this study was to test whether health and infrastructure variables correlated with the electability of political dynasties in local elections in Indonesia in 2017-2020. This study uses data on average 5 years before 2017-2020 local elections and 508 districts/cities participating in the local election. Probit and heckprobit regression models tested whether the probability of political dynasty is affected by government's health insurance membership and steady road conditions. The selection bias control show retrospective economic voting where Non-PBI BPJS significantly reduces the probability of political dynasty's electability however stable road conditions significantly increase the probability of political dynasty's electability.*

**Keywords:** Health, Infrastructure, Local elections, Retrospective economic voting, Political dynasty.

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menguji apakah variabel kesehatan dan variabel infrastruktur berkorelasi pada keterpilihan dinasti politik di pilkada Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan data rata-rata 5 tahun sebelum pilkada 2017, 2018 dan 2020 dan sample yang digunakan adalah 508 Kabupaten/Kota peserta pilkada. Penelitian ini menggunakan model regresi probit dan heckprobit untuk menguji apakah probabilitas keterpilihan dinasti politik dipengaruhi oleh kepersertaan jaminan kesehatan milik pemerintah dan kondisi jalan mantap. Hasil kontrol selection bias menunjukkan retrospective economic voting dimana BPJS Non-PBI signifikan menurunkan probabilitas keterpilihan dinasti politik. Sebaliknya kondisi jalan mantap signifikan meningkatkan probabilitas keterpilihan dinasti politik.

**Kata Kunci:** Kesehatan, Infrastruktur, Pilkada, Retrospective Economic Voting, Dinasti Politik

## PENDAHULUAN

Perpindahan kekuasaan antar generasi adalah hal yang biasa dalam sistem monarki, namun begitu untuk negara demokrasi juga sering terjadi perpindahan kekuasaan dari satu generasi ke generasi yang lain. Walaupun dalam negara dengan sistem demokrasi

rakyat dapat memilih pemimpinnya dalam pemilu, namun kita tidak dapat memungkiri eksistensi dinasti politik dalam sistem demokrasi.

Dinasti politik adalah politisi yang memiliki hubungan darah atau adanya hubungan perkawinan dengan individu lainnya yang sebelumnya memegang kekuasaan politik

---

\*alamat korespondensi : Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta. Email : juli.wahyuni@gmail.com

(Geys, 2017). Sehingga dalam dinasti politik terdapat dua atau lebih anggota keluarga yang duduk di jabatan politik (Smith, 2012). Adanya karakteristik keluarga dalam politik membuat transfer kekuasaan merupakan sesuatu hal yang dapat diwariskan/diturunkan oleh politikus yang sedang berkuasa (Dal Bo, 2009).

Keberadaan dinasti politik di dunia tersebar baik di negara yang memiliki sistem demokrasi yang mapan maupun negara dengan sistem demokrasi yang baru. Contoh dinasti politik di negara yang memiliki sistem demokrasi yang mapan diantaranya di Amerika Serikat ada George W. Bush, presiden Amerika Serikat yang berkuasa pada tahun 2000-2009. George W. Bush adalah anak dari George Bush yang merupakan Presiden Amerika periode tahun 1989-1993. Sedangkan dinasti politik di negara dengan sistem demokrasi yang sedang berkembang diantaranya di Singapura ada Lee Hsien Long yang sejak tahun 2004-sekarang menjabat sebagai Perdana Menteri Singapura. Lee Hsien Long adalah anak dari Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura periode tahun 1959-1990.

Awalnya dinasti politik di Indonesia adalah suatu pelanggaran berdasarkan Pasal 7 huruf r Undang-Undang No. 8 Tahun 2015:

*"Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*(r). tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana."*

Tapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 menyatakan pasal 7 huruf r Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada periode 2017-2020 terdapat 3 kali Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia, yaitu Pilkada tahun 2017 yang diikuti oleh 94 Kabupaten/Kota, Pilkada tahun 2018 yang diikuti oleh 153 Kabupaten/Kota, dan Pilkada tahun 2020 yang diikuti oleh 261 Kabupaten/Kota. Sehingga total peserta Pilkada adalah 508 Kabupaten/Kota.

Dari total 508 Kabupaten/Kota peserta pilkada, terdapat 247 Kabupaten/Kota yang terindikasi dinasti politik dimana terdapat kandidat bupati/wakil bupati/walikota/wakil walikota yang memiliki hubungan darah/perkawinan dengan pimpinan nasional/pimpinan kepala daerah/anggota dewan yang berada di DPR/DPRD baik yang masih berkuasa ataupun berkuasa pada periode sebelumnya. Dan dari 247 Kabupaten/Kota tersebut, kandidat dinasti politik menang di 170 Kabupaten/Kota (69%). Sementara, jumlah kandidat bupati/wakil bupati/walikota/wakil walikota yang terindikasi dinasti politik adalah sebanyak 305 orang atau sebanyak 10% dari total 3.030 orang jumlah kandidat.

Walaupun hanya 10% jumlah kandidat yang terindikasi dinasti politik, namun rasio kemenangan dinasti politik mencapai 69%. Sehingga kandidat bupati/wakil bupati/walikota/wakil walikota yang

terindikasi dinasti memiliki probabilitas yang besar untuk memenangi Pilkada.

Studi di Indonesia mengenai keterpilihan dalam pilkada sudah pernah dilakukan oleh Rumayya, *et al* (2020). Dengan menggunakan *Retropective Economic Voting Model*, Rumayya, *et al* (2020) menunjukkan bahwa kinerja suatu daerah memiliki pengaruh terhadap keterpilihan incumbent di pilkada. Rumayya, *et al* (2020) menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi per kapita dan tingkat pengangguran sebagai proksi kinerja pemerintahan daerah, dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi per kapita berpengaruh signifikan terhadap keterpilihan *incumbent*. Namun demikian pengaruh tersebut lebih dikarenakan adanya faktor "luck" dibandingkan "competence".

Rumayya, *et al* (2020) belum mempertimbangkan unsur dinasti politik dalam estimasinya. Secara empiris di Indonesia, faktor dinasti politik memiliki peran yang penting pada keterpilihan seorang kandidat pilkada dimana rasio kemenangan dinasti politik mencapai 69%. Karenanya efek kinerja daerah akan bias jika tidak memperhitungkan efek dinasti politik ini.

Berdasarkan fakta tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk mengestimasi pengaruh kinerja pemerintahan daerah terhadap keterpilihan dinasti politik. Sejalan dengan penelitian Rumaya, *et al* (2020) yang menggunakan *Retropective Economic Voting Model* dalam mengestimasi kinerja, penelitian ini juga menggunakan *Retropective Economic Voting Model* untuk mengukur kinerja dinasti politik. Dalam berbagai penelitian *Retropective Economic Voting Model* di berbagai negara, fokus menggunakan variabel

pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan inflasi dalam mengukur kinerja. Namun menurut Rumayya, *et al* (2020) dalam kasus di Indonesia, variabel rata-rata pertumbuhan ekonomi per kapita merupakan faktor "luck" bagi keterpilihan incumbent. Hal ini berarti, kinerja rata-rata pertumbuhan ekonomi per kapita daerah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor di luar perekonomian lokal daerah yang dapat berupa keadaan perekonomian negara, keadaan ekonomi dunia, ataupun perekonomian sudah berjalan secara autopilot.

Penelitian ini berusaha mencari variabel yang mempengaruhi faktor kinerja yang dapat mempengaruhi keterpilihan kandidat pilkada tanpa ada pengaruh unsur "luck" di dalamnya. Variabel kesehatan berupa kepemilikan jaminan kesehatan dari pemerintah dan variabel infrastruktur berupa kondisi kemantapan jalan menjadi faktor yang sesuai dalam menggambarkan kinerja pemerintah dan memberikan "value" bagi voters untuk menentukan hak pilihnya.

Kondisi jalan mantap menjadi proksi bagaimana pemerintah memberikan fasilitas barang publik kepada masyarakat dan kepemilikan jaminan kesehatan dari pemerintah menjadi proksi bagaimana pemerintah memberikan perlindungan kesehatan secara universal kepada masyarakat.

Walaupun dalam berbagai penelitian terkait elektabilitas secara umum menggunakan variabel anggaran atau realisasi bantuan sosial dan hibah dalam estimasinya, dalam penelitian ini variabel tersebut dinilai tidak relevan dalam estimasi dengan menggunakan

*Retropective Economic Voting Model*. Variabel anggaran atau realisasi bantuan sosial dan hibah merupakan faktor input dan bukan faktor kinerja pemerintahan, sehingga tidak sesuai digunakan dalam estimasi *Retropective Economic Voting Model* yang fokus menilai pada kinerja (output).

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan umum di atas, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana korelasi variabel kesehatan dan variabel infrastruktur dengan keterpilihan dinasti politik pada Pilkada Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2017-2020.

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi korelasi variabel kesehatan dan variabel infrastruktur dengan keterpilihan dinasti politik pada Pilkada Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2017-2020.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yaitu dalam hal studi empiris mengenai korelasi variabel kesehatan dan variabel infrastruktur dengan keterpilihan dinasti politik pada Pilkada Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2017-2020. Dimana menurut pengetahuan penulis, studi yang membahas mengenai hubungan ini masih terbatas jumlahnya.

Penelitian ini terbatas pada dinasti politik pada Pilkada Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2017-2020. Dinasti politik yang dimaksud adalah kandidat bupati/wakil bupati/walikota/wakil walikota yang memiliki hubungan darah/perkawinan (bisa berupa ayah/ibu/suami/istri/anak/adik/kakak/adik

ipar/kakak ipar/paman/keponakan/sepupu/menantu/ besan/cucu) dengan pimpinan daerah/anggota dewan (DPR/DPRD) yang masih berkuasa/berkuasa pada periode sebelumnya.

## TINJAUAN LITERATUR

### Kerangka Konseptual

Dinasti politik adalah politisi yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan individu lainnya yang memiliki memegang jabatan kekuasaan sebagai kepala daerah atau anggota dewan (Geys & Smith, 2017) yang contohnya meliputi orang tua (ayah/ibu), anak, cucu, saudara kandung (adik/kakak), pasangan (suami/istri), saudara ipar, dan lainnya. Dalam dinasti politik setidaknya terdapat generasi kedua dari kandidat warisan (politisi yang memiliki hubungan darah/perkawinan) yang berhasil terpilih atau terdapat dua atau lebih anggota keluarga yang duduk di jabatan politik (Smith, 2012). Ketika seseorang memiliki kekuasaan, ada kecenderungan orang tersebut akan memulai atau melanjutkan sebuah dinasti politik. Dengan demikian, kekuatan politik dalam demokrasi menjadi sesuatu hal yang dapat diturunkan/diwariskan secara de facto karena adanya perbedaan yang tetap dalam karakteristik keluarga (Dal Bo, *et al.*, 2009).

Keberadaan dinasti politik ini menimbulkan perdebatan pro dan kontra. Pihak yang pro terhadap dinasti politik berpendapat bahwa dinasti politik memberikan pengaruh positif yaitu dinasti politik memiliki motivasi lebih tinggi untuk melayani daerah/konstituennya karena menyangkut reputasi keluarga yang disandangnya. Selain itu juga, dinasti politik akan mendapatkan peningkatan kapasitas

dari tutorial yang dilakukan oleh anggota keluarga yang sebelumnya pernah memiliki jabatan politik (Parker, 1996). Dinasti politik memiliki kekuatan otonomi yang signifikan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat memberikan pengaruh positif bagi tingkat pertumbuhan ekonomi (Besley & Reynal-Querol, 2015).

Sedangkan pihak yang kontra terhadap dinasti politik berpendapat bahwa dinasti politik memiliki kinerja yang buruk yang ditandai oleh penyediaan barang publik yang lebih buruk (George & Ponattu, 2018), transfer yang diberikan kepada daerah yang memiliki kepala dinasti politik dilakukan tidak efisien sehingga menyebabkan ekonomi tertekan (Asako *et al*, 2015), memiliki anggaran belanja yang besar untuk investasi di sektor infrastruktur namun tidak terdapat perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi dan perubahan dalam kualitas pelayanan publik (Bragança *et al*, 2015), memiliki kecenderungan yang kuat mengimplementasikan Political Budget Cycles (Daniele & Vertier, 2021) dan daerah dimana dinasti politik berkuasa memiliki standar hidup yang lebih rendah (Mendoza *et al*, 2012).

Dal Bo, *et al*. (2009) menyebutkan bahwa memiliki kekuatan legislatif lebih dari 1 periode meningkatkan probabilita 2 kali lipat untuk memiliki anggota keluarga lainnya untuk duduk di kongres di kemudian hari. Hal ini memberikan kesempatan dinasti politik untuk mengakumulasi asetnya yang dapat ia wariskan seperti kekuatan finansial, kualitas personal, pengakuan nama besar, atau jaringan relasi.

Akumulasi aset yang dimiliki oleh kandidat dinasti politik memberikan keuntungan

elektoral karena kandidat dinasti politik lebih dikenal oleh *voters* maupun partai. Kandidat dinasti politik pun lebih mampu mengumpulkan dana kampanye dan memiliki kemampuan untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan keluarganya yang memiliki akses ke kekuasaan dan sumber daya publik (Smith, 2012; Querubin, 2016).

Dalam sistem demokrasi terdapat sistem pemilihan umum (pemilu) untuk memilih kandidat peserta pemilu. *Voters* adalah rasional dan berusaha untuk memilih kandidat yang kompeten. Namun demikian terdapat *adverse selection* dalam memilih kandidat yang kompeten (Persson & Tabellini, 2002).

*Voters* menghadapi asymmetric information dalam mengetahui kompetensi tersebut (Besley & Smart, 2017; Besley & Case, 1995; Salmon 1987) dan *voters* juga menghadapi *attribution errors* yaitu kegagalan dalam memperhitungkan eksternalitas ketika berusaha menilai kompetensi kandidat (Wolfers, 2007). Oleh karena itu, *voters* sesungguhnya tidak mengetahui kompetensi apa yang sebenarnya dimiliki kandidat tersebut.

Beberapa penelitian menghubungkan *attribution errors* dalam konteks *retrospective economic voting*. Seperti di Amerika Serikat, gubernur dari negara bagian yang memproduksi minyak cenderung akan terpilih lagi ketika harga minyak naik (Wolfers, 2007). Di Australia, *voters* memilih gubernur negara bagian karena kompetensi mereka (*competence*) dilihat dari tingkat pengangguran negara bagian mereka dibandingkan dengan keseluruhan Australia dan keberuntungan (*luck*) dilihat dari tingkat

pengangguran yang umum terjadi di seluruh negara bagian (Leigh & Mcleish, 2009).

*Retrospective economic voting* adalah *reward and punishment model*, dimana *incumbent* dipilih karena memberikan kinerja yang baik seperti pertumbuhan pendapatan, menciptakan peluang kerja, dan stabilitas harga. Sebaliknya *voters* tidak akan memilih *incumbent* jika kinerja yang diberikan buruk, seperti pendapatan yang turun, peningkatan tingkat pengangguran, dan adanya inflasi yang tidak terkendali (Powell & Whitten, 1993; Kiewiet, 2000).

*Voters* cenderung akan melihat kepentingan ekonomi pribadinya sebagai dasar untuk memilih dibandingkan dengan melihat ekonomi negara (Lewis-Beck & Paldam, 2000). Oleh karenanya preferensi dalam memilih kandidat pilkada akan dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya menikmati fasilitas yang merupakan hasil kinerja pemerintah.

Jalan raya sebagai barang publik merupakan proksi kinerja pemerintah dalam hal memberikan fasilitas publik kepada masyarakat. Sedangkan kepemilikan jaminan kesehatan milik pemerintah merupakan proksi kinerja pemerintah dalam hal memberikan perlindungan kesehatan yang universal bagi masyarakat. Pemanfaatan kedua jenis fasilitas publik ini bersifat umum dan luas sehingga dapat menjadi variabel proksi *retropective*.

*Retrospective economic voting* dalam hal dinasti politik, *voters* akan memilih kandidat dinasti politik jika dinasti politik terbukti memberikan kinerja yang baik dalam hal memberikan jaminan kesehatan yang

universal kepada masyarakat dan memberikan fasilitas publik yang baik yaitu kondisi jalan yang mantap. Sebaliknya, *voters* tidak akan memilih dinasti politik jika pendahulu dinasti politik memiliki kinerja yang buruk.

### **Dinasti Politik di Indonesia**

Pada era Orde Baru pimpinan Presiden Suharto, Indonesia menganut sistem pemerintahan terpusat, dimana seluruh pimpinan daerah dipilih oleh pemerintah pusat. Namun sejak jatuhnya rezime Suharto pada tahun 1998, reformasi terjadi di segala bidang. Salah satu perubahan yang paling utama adalah adanya kebijakan sistem desentralisasi dimana pemerintah pusat mentransfer beberapa fungsi administratif, fiskal dan politik ke pemerintahan daerah yaitu pada level pemerintah Propinsi dan pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pada periode 1999-2004, kepala daerah masih dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Mulai tahun 2005, diterapkan kebijakan pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. Masa reformasi ini membuka kesempatan bagi elit daerah untuk berkonsolidasi dan melebarkan sayap kekuasaannya dengan menggunakan jalur demokrasi mengikuti pilkada. Karenanya dinasti politik di Indonesia menjadi fenomena yang nyata dalam sistem demokrasi yang menganut sistem pemilihan langsung.

Ada berbagai cara untuk membangun dinasti politik: pimpinan daerah yang habis masa jabatannya kemudian mencalonkan anggota keluarganya untuk mengikuti pilkada, pimpinan daerah mendorong

anggota keluarganya untuk duduk menjadi anggota dewan, anggota dewan mendorong anggota keluarganya untuk duduk menjadi anggota dewan, dan anggota dewan mendorong anggota keluarganya untuk mengikuti pilkada.

Membangun dinasti politik merupakan strategi untuk melindungi dari ancaman penjara karena korupsi, sumber daya jaringan relasi yang dapat digunakan untuk mobilisasi politik dan sebagai sumber daya identitas (Buehler, 2013).

Sejak jatuhnya rezime Suharto pada tahun 1998, Indonesia berhasil melakukan transisi dari negara yang otoriter menjadi negara yang demokratis. Namun demikian pada perkembangannya sistem demokratis ini hanya terjadi pada level nasional. Untuk level daerah, banyak terjadi persaingan rezime yang otoriter di sebagian daerah di Indonesia (Kenawas, 2015).

Contoh dinasti politik yang menjadi rezime otoriter ada di Banten yaitu dinasti Ratu Atut. Banten merupakan propinsi yang baru didirikan tahun 2000. Proses pembentukan propinsi baru ini tidak lepas dari peran Haji Chasan Sohib, seorang pengusaha dan kontraktor yang memonopoli pengerjaan proyek pembangunan di Banten dan ia juga seorang jawara yang banyak mengintimidasi orang lain. Anak Haji Chasan Sohib yaitu Ratu Atut menjadi wakil gubernur Banten pertama, sedangkan Hikmat Tomet (Suami Ratu Atut) adalah ketua DPC Golkar di Banten kala itu. Walaupun saat ini Ratu Atut sudah tidak lagi berkuasa, namun masih banyak anggota keluarganya yang masih memiliki kekuasaan diantaranya Andika Hazrumy (anak Ratu Atut)

sebagai Wakil Gubernur Banten, Pilar Saga Ichsan (keponakan Ratu Atut), sebagai Wakil Walikota Tangerang Selatan. Faktor keterpilihan keluarga besar Ratu Atut ini, diantaranya adalah faktor keturunan jawara yang memiliki kekuasaan informal yang mengintimidasi, adanya dukungan finansial yang besar dan banyak anggota keluarga yang memiliki jabatan lainnya yang tersebar di berbagai daerah di Banten.

### **Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)**

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kesehatan) telah ditunjuk menjadi penyelenggara program jaminan sosial melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial. Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Kepesertaan JKN-KIS dibagi menjadi 2 (tiga) jenis yaitu: penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) dan bukan penerima bantuan iuran (Non-PBI).

Kepesertaan BPJS-Kesehatan PBI-JK diperuntukan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD. Sedangkan kepesertaan BPJS Kesehatan Non-PBI terdiri dari pekerja penerima upah baik yang merupakan penyelenggara negara maupun bukan penyelenggara negara, pekerja bukan penerima upah yang iurannya dibayar sendiri,

dan bukan pekerja yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat/daerah.

### **Jaminan Kesehatan Daerah**

Walaupun pemerintah sudah menunjuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kesehatan) sebagai Badan penyelenggara program jaminan sosial, namun demikian BPJS-Kesehatan dalam pelaksanaannya belum dapat memberikan jaminan kesehatan masyarakat sepenuhnya kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu. Oleh karena itu, bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan dari BPJS-Kesehatan, maka jaminan kesehatannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah setempat. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, pemerintah daerah berwenang mengembangkan sistem jaminan sosial khususnya di bidang kesehatan melalui Jamkesda.

### **Jalan Mantap**

Infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Untuk itu kondisi jalan harus dalam keadaan mantap yaitu kondisi dimana jalan memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman. Jalan dengan kondisi baik memiliki angka *International Roughness Indeks* (IRI) kurang dari 4, sedangkan jalan dengan kondisi sedang memiliki angka IRI dibawah 8. IRI adalah satuan pengukuran kondisi jalan yang diukur dengan menggunakan alat roughometer yang mengukaur akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km).

Untuk menjaga kualitas infrastruktur jalan, diperlukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat dan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Sedangkan pemeliharaan berkala adalah kegiatan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Untuk jalan dengan kondisi yang parah, diperlukan penanganan berupa rehabilitasi untuk menangani kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain.

### **Studi Terdahulu**

Hingga saat ini belum ada penelitian yang menggunakan teori *restropective economic voting* untuk mengukur keterpilihan dinasti politik di Pilkada. Penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan yang sama namun untuk objek yang berbeda adalah Rumayya, *et al.*, (2020) yang menggunakan teori *restropective economic voting* untuk mengukur keterpilihan kembali petahana kepala daerah di Indonesia. Penelitian Rumayya, *et al.*, (2020) menggunakan data pilkada tahun 2005-2013 menyimpulkan bagi *incumbent* hanya rata-rata pertumbuhan GDP perkapita tahunan yang berpengaruh pada keterpilihan kembali petahana.

Penelitian lainnya terkait dinasti politik di Indonesia hanyalah seputar anatomi dinasti politik di Indonesia seperti membahas patronase dinasti politik dan kegagalan kaderisasi partai (Simanjuntak, 2021;

Nugroho, *et al.*, 2021, Fadhillah *et al.*, 2020). Penelitian lainnya membahas lebih detail mengenai dinasti politik di Banten (Kenawas, 2015; Sutisna 2017), di Kalimantan Tengah (Aspinall & As'ad, 2016), di Sulawesi Selatan (Buehler, 2013).

Penelitian yang komprehensif mengenai dinasti politik yang menjadi referensi penelitian dinasti politik adalah penelitian yang dilakukan oleh Dal Bo, *et al.* (2009) yang menguji hubungan masa jabatan kekuasaan anggota Kongres di Amerika Serikat dengan probabilitas memiliki anggota keluarga lainnya yang duduk dalam kekuasaan politik di kemudian hari. Hal ini oleh Dal Bo, *et al.* (2009) disebut sebagai *self perpetuating*. Dengan menggunakan *regression discontinuity (RD) design*, Dal Bo, *et al.* (2009) berusaha memisahkan faktor pengaruh petahana dari efek lainnya seperti karisma seseorang, kekayaan, dan sebagainya yang mungkin ada pada anggota keluarga dinasti politik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan data pilkada dari 508 Kabupaten/Kota di Indonesia selama periode 2017-2020 yang meliputi 3 (tiga) kali pelaksanaan Pilkada yaitu tahun 2017, 2018, dan 2020. Data profil dinasti politik disusun berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang kemudian diolah kembali dari berbagai sumber terkait asal usul kekerabatan kandidat peserta Pilkada.

Penulis menggunakan variabel kesehatan dan infrastruktur untuk mengukur *retrospective economic voting* pada keterpilihan dinasti politik. Kedua variabel ini relevan dalam menilai *retrospective economic*

*voting* kinerja pemerintahan sebelumnya. Walaupun *voters* tidak bisa mengatasi minimnya informasi mengenai kualitas personal kandidat peserta pilkada, namun dengan melihat dan merasakan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah diantaranya fasilitas kesehatan dan perbaikan kondisi jalan memberikan informasi yang cukup bagi *voters* untuk memutuskan kandidat mana yang akan dipilih (Oliver & Ha 2007).

*Dependen variable* dalam penelitian ini adalah dummy dinasti politik menang pilkada. Dummy bernilai 1 jika dinasti politik menang dan dummy bernilai 0 jika dinasti politik kalah. Sedangkan yang dimaksud dengan dinasti politik adalah kandidat peserta pilkada yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pimpinan daerah/anggota DPR/anggota DPRD yang masih menjabat ataupun pernah menjabat pada periode sebelumnya. Data diperoleh dari KPU-RI.

*Interest variable* kesehatan berupa persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan milik pemerintah (yang terdiri dari BPJS-Kesehatan PBI-JK, BPJS Kesehatan Non-PBI, dan Jamkesda). Kepesertaan BPJS-Kesehatan PBI-JK diperuntukan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD. Sedangkan kepesertaan BPJS Kesehatan Non-PBI terdiri dari pekerja penerima upah dan pekerja yang membayar sendiri iurannya. Sata diperoleh dari BPS.

*Interest variabel* infrastruktur yang berupa persentase kondisi jalan mantap yaitu persentase panjang jalan yang memiliki kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang

memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman. Data diperoleh dari Kemen-PUPR.

*Control variable* ekonomi yaitu pertumbuhan PDRB per kapita dan tingkat pengangguran yang di telah dirata-ratakan sepanjang 5 tahun masa jabatan pemerintahan sebelum pilkada berlangsung. Pemilihan data rata-rata didasari oleh persepsi publik dalam menilai kinerja pemerintahan adalah secara garis besar (rata-rata) bukan melihat detail per tahunnya. Data diperoleh dari BPS.

*Control variable demografik* dalam penelitian ini adalah adalah dummy variabel untuk daerah yang berlokasi di Pulau Jawa (dummy bernilai 1 untuk Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Jawa; dummy bernilai 0 untuk Kabupaten/Kota yang berada di luar Pulau Jawa). Pemilihan *control variable* Jawa adalah untuk untuk menggambarkan perbedaan level demokrasi di Indonesia. Dimana tingkat demokrasi di Pulau Jawa diasumsikan lebih maju karena akses informasi dan media yang relatif lebih mudah dibanding dengan daerah yang di luar pulau Jawa.

*Control variable* kualitas voters dalam penelitian ini adalah rata-rata persentase penduduk miskin dan rata-rata lama sekolah. Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk untuk mengikuti pendidikan formal. Pemilihan kedua variabel ini relevan untuk menggambarkan bagaimana kualitas voters di suatu daerah. Data diperoleh dari BPS.

*Control variable* politik adalah adanya incumbent dalam kandidat Pilkada. Incumbent disini adalah peserta pilkada yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota mencalonkan kembali untuk posisi yang sama atau posisi yang lebih tinggi (sebelumnya Wakil Bupati mencalonkan kembali menjadi Bupati atau sebelumnya Wakil Walikota, mencalonkan kembali menjadi Walikota). Data diperoleh dari KPU-RI.

Model probit yang akan dibangun adalah:

$$\begin{aligned} Menangi = & \alpha + \beta_1 BPJSPBI_i \\ & + \beta_2 BPJSNonPBI_i \\ & + \beta_3 Jamkesda_i \\ & + \beta_4 Jalan Mantap_i \\ & + \gamma_1 AvgPDRB_i \\ & + \gamma_2 AvgUnemployment_i \\ & + \gamma_3 Jawa_i + \gamma_4 AvgMiskin_i \\ & + \gamma_5 LnAvgSekolah_i \\ & + \gamma_6 AdaIncumbent_i + \varepsilon_i \end{aligned}$$

Pada persamaan di atas memiliki resiko terjadi *selection bias* karena data dinasti dinasti politik yang menang hanya terdapat pada Kabupaten/Kota yang memiliki kandidat yang berasal dari dinasti politik. Karenanya Heckprobit selection model digunakan dalam penelitian ini untuk mengontrol adanya potensi *sample selection bias*.

Menang atau tidaknya kandidat dinasti politik tergantung dari ada tidaknya kandidat dinasti politik yang mengikuti Pilkada Kabupaten/Kota. Karenanya *selection model* yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$z_i^* = \theta + x_i'\delta + \mu_i$$

Dimana,  $i = 1, \dots, 508$

$$Dinasti_i = \begin{cases} 1 & \text{jika } z_i^* > 0 \\ 0 & \text{sebaliknya} \end{cases}$$

$$\mu_i \sim N[0,1]$$

$$corr[\varepsilon_i \mu_i] = \rho$$

Variabel  $z_i^*$  adalah *variable* yang tidak dapat diobservasi yang menjelaskan probabilita ada tidaknya dinasti politik dengan memperhatikan variabel penjelas yang berisi  $x_i'\delta$  di Kabupaten/Kota  $i$ . Selanjutnya  $\theta$  adalah *variable* kontanta,  $x_i'\delta$  adalah variabel independen yang dapat diobservasi di Kabupaten/Kota  $i$ ,  $\delta$  adalah koefisien yang berhubungan dengan Kabupaten/Kota  $i$ , dan  $\mu_i$  adalah *error term* dari hasil dan persamaan *selection bias*.

Nilai  $\rho$  digunakan untuk menilai resiko ada tidaknya *selection bias*. Jika secara statistik terbukti  $\rho=0$ , maka tidak terbukti adanya *selection bias*. Yang berarti bahwa variabel terpilih (menang) dan persamaan *selection* adalah independen, sehingga membuat tidak

Penulis berpendapat bahwa faktor penentu ada tidaknya dinasti politik dalam pilkada di suatu Kabupaten/Kota tergantung dari ada tidaknya pendahulu (generasi pertama/sebelumnya) dari kandidat dinasti politik yang masih berkuasa/memegang jabatan publik. Terdapat hubungan antara masa jabatan (tenor) seseorang yang berkuasa dengan kecenderungan memiliki anggota keluarga lainnya yang duduk di kekuasaan politik di kemudian hari (Dal Bo, *et al*, 2009). Oleh karenanya jika terdapat kepala daerah/anggota dewan yang terindikasi dinasti politik yang masih menjabat/berkuasa, hal ini akan meningkatkan probabilitas penerus dinasti politik menjadi kandidat peserta pilkada.

### HASIL

Data yang digunakan dalam penelitian ini digambarkan pada tabel 1, dimana masing-masing variabel Kesehatan (Kepemilikan BPJS PBI, BPJS NonPBI dan Jamkesda) dan

**Tabel 1** Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Menang	508	.337	.473	0	1
BPJSPBI	508	36.457	17.393	0	83.14
BPJSNonPBI	508	19.639	11.28	0	65.65
Jamkesda	508	14.389	25.923	0	100
JalanMantap	508	61.462	19.566	5.205	100
AvgPDRB	508	7.174	3.435	-4.56	48.86
AvgUnemployment	508	5.05	2.604	.062	16.02
Jawa	508	.222	.416	0	1
AvgMiskin	508	12.877	7.927	1.82	44.49
LnAvgSekolah	508	2.046	.259	-.422	2.519
AdaIncumbent	508	.797	.402	0	1
Dinasti	508	.488	.5	0	1
DinastiContinue	508	.281	.45	0	1

Sumber: KPU, BPS, Berbagai Sumber, diolah Peneliti

perlu ada *selection model*. Namun, jika  $\rho$  berbeda secara signifikan dari nilai nol, model probit biasa akan memberikan hasil yang bias. Karenanya model heckprobit akan menjadi model dengan parameter yang konsisten.

Variabel Infrastruktur (Jalan Mantap) menjelaskan pengaruhnya terhadap probabilita keterpilihan dinasti politik pada pilkada 2017-2020.

Koefisien estimasi dan marginal efek dari model regresi probit ditunjukkan pada tabel 2. Pengaruh variabel interest Kesehatan dan

dinasti politik terpilih 0,59% lebih rendah untuk setiap kenaikan 1% BPJS Non-PBI.

Sedangkan interest variable Infrastruktur

**Tabel 2** Regresi Probit

Variabel Independen:	(1)	(2)
Menang	Robust	Marginal Effect Robust
BPJSPBI	-0.00537 (0.00397)	-0.00193 (0.00143)
BPJSNonPBI	-0.0164** (0.00758)	-0.00591** (0.00272)
Jamkesda	-0.00344 (0.00265)	-0.00124 (0.000951)
JalanMantap	0.0102*** (0.00383)	0.00367*** (0.00137)
AvgPDRB	0.0609** (0.0296)	0.0219** (0.0107)
AvgUnemployment	-0.0242 (0.0259)	-0.00871 (0.00931)
Jawa	0.0375 (0.162)	0.0135 (0.0581)
AvgMiskin	-0.0222** (0.0107)	-0.00800** (0.00385)
LnAvgSekolah	0.174 (0.323)	0.0626 (0.116)
AdalIncumbent	0.133 (0.147)	0.0477 (0.0528)
Constant	-1.013 (0.741)	
Observations	508	508
Pseudo r-squared	0.0635	
Wald chiz (10)	34.10	
Prob > chiz	0.0002	
McFadden's R2	0.063	

Robust standard errors in parentheses

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1

Sumber: KPU, BPS, Kemenkeu, diolah Peneliti

Infrastruktur terhadap probabilita keterpilihan (Menang) dinasti politik ditunjukkan tabel 2.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *interest variable* Kesehatan BPJS-NonPBI signifikan menurunkan probabilita keterpilihan dinasti politik. *Marginal effect* dari regresi probit menunjukkan bahwa probabilita

jalan mantap signifikan meningkatkan probabilita keterpilihan dinasti politik.

*Marginal effect* dari regresi probit menunjukkan bahwa probabilita dinasti politik terpilih 0,36% lebih lebih tinggi untuk setiap kenaikan 1% Jalan Mantap.

*Control variable* ekonomi rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita (AvgPDRB)

**Tabel 3** Regresi Heckprobit

<i>Variabel Independen:</i>	(1)	(2)
<i>Menang</i>	<i>Heckprobit</i>	<i>Marginal Effect Heckprobit</i>
<i>BPJSPBI</i>	0.00144 (0.00620)	0.000535 (0.00230)
<i>BPJSNonPBI</i>	-0.0322*** (0.0119)	-0.0120*** (0.00440)
<i>Jamkesda</i>	-0.00105 (0.00376)	-0.000390 (0.00139)
<i>JalanMantap</i>	0.0148*** (0.00537)	0.00548*** (0.00202)
<i>AvgPDRB</i>	0.0217 (0.0293)	0.00805 (0.0109)
<i>AvgUnemployment</i>	-0.0284 (0.0398)	-0.0105 (0.0148)
<i>Jawa</i>	-0.0697 (0.236)	-0.0259 (0.0876)
<i>AvgMiskin</i>	-0.00156 (0.0174)	-0.000579 (0.00647)
<i>LnAvgSekolah</i>	0.418 (0.748)	0.155 (0.278)
<i>AdalIncumbent</i>	0.384* (0.204)	0.142* (0.0750)
<i>Constant</i>	-1.072 (1.456)	
<i>Dinasti Selection Model:</i>		
<i>DinastiContinue</i>	6.609*** (0.0704)	
<i>Constant</i>	-0.560*** (0.0696)	-
<i>/athrho</i>	0.301** (0.144)	
<i>Model Criteria:</i>		
<i>Total number of obs</i>	508	
<i>Censored obs</i>	260	
<i>Uncensored obs</i>	248	
<i>Log psedolikelihood</i>	-357.9988	
<i>Wald Chiz (10)</i>	22.61	
<i>Prov &gt; Chiz</i>	0.0123	
<i>Selectivity Test (rho=0):</i>		
<i>Chiz (1)</i>	4.34	
<i>Prob &gt; Chiz</i>	0.0372	

Robust standard errors in parentheses

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1

Sumber: KPU, BPS, KemenPUPR, diolah Peneliti

signifikan meningkatkan probabilita keterpilihan dinasti politik. *Marginal effect* menunjukan bahwa probabilita dinasti politik

terpilih 2,19% lebih tinggi untuk setiap kenaikan 1% rata-rata pertumbuhan PDRB.

**Tabel 4** Robustness Check

Variabel Independen:	(1)	(2)	(3)	(4)
Menang	Heckprobit	Marginal Effect Heckprobit	Heckprobit	Marginal Effect Heckprobit
<i>BPJSPBI</i>	0.00192 (0.00609)	0.000708 (0.00224)		
<i>BPJSNonPBI</i>	-0.0294** (0.0119)	-0.0108** (0.00435)		
<i>Jamkesda</i>	-0.00129 (0.00369)	-0.000477 (0.00136)		
<i>JalanMantap</i>			0.0133** (0.00536)	0.00502** (0.00203)
<i>AvgPDRB</i>	0.0150 (0.0269)	0.00554 (0.00996)	0.0337 (0.0329)	0.0127 (0.0125)
<i>AvgUnemployment</i>	-0.0210 (0.0397)	-0.00774 (0.0146)	-0.0346 (0.0390)	-0.0131 (0.0147)
<i>Jawa</i>	0.252 (0.206)	0.0930 (0.0761)	-0.0689 (0.231)	-0.0260 (0.0870)
<i>AvgMiskin</i>	-0.00503 (0.0168)	-0.00186 (0.00622)	0.00716 (0.0163)	0.00270 (0.00612)
<i>LnAvgSekolah</i>	0.559 (0.726)	0.206 (0.268)	-0.566 (0.631)	-0.213 (0.238)
<i>AdalIncumbent</i>	0.394** (0.201)	0.145** (0.0734)	0.329* (0.197)	0.124* (0.0736)
<i>Constant</i>	-0.532 (1.396)		0.268 (1.378)	
<i>DinastiContinue</i>	6.630*** (0.0704)		6.609*** (0.0696)	
<i>Constant</i>	-0.560*** (0.0696)	-	-0.560*** (0.0697)	-
<i>/athrho</i>	0.273* (0.144)		0.348** (0.144)	
<i>Model Criteria:</i>				
<i>Total number of obs</i>	508		508	
<i>Censored obs</i>	260		260	
<i>Uncensored obs</i>	248		248	
<i>Log psedolikelihood</i>	-361.7177		-362.5333	
<i>Wald Chi2 (9)</i>	14.44			
<i>Wald Chi2 (7)</i>			12.19	
<i>Prov &gt; Chi2</i>	0.1075		0.0944	
<i>Selectivity Test</i>				
<i>(rho=0)</i>				
<i>Chi2 (1)</i>	3.61		5.83	
<i>Prob &gt; Chi2</i>	0.0573		0.0157	

Robust standard errors in parentheses

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1

Sumber: KPU, BPS, KemenPUPR diolah Peneliti

Untuk control variable kualitas voters, rata-rata persentase orang miskin signifikan menurunkan probabilita keterpilihan dinasti

politik. Marginal effect menunjukkan bahwa probabilita dinasti politik terpilih 0,8% lebih

rendah untuk setiap kenaikan 1% porsi rata-rata persentase orang miskin.

Untuk mengatasi masalah selection bias, penulis menggunakan Heckprobit model untuk mengestimasi pengaruh variabel interest Kesehatan dan Infrastruktur terhadap politik yang ditunjukkan dalam tabel 3. Hasil estimasi persamaan selection model probabilitas.

Keterpilihan (menang) dinasti menunjukkan bahwa uji signifikan untuk rho secara bahwa uji signifikan untuk rho secara statistik terbukti bahwa  $\rho$  menolak hipotesis 0. Hal ini membenarkan penggunaan model seleksi Heckprobit.

Hasil dari tabel 3 menunjukkan bahwa setelah mengontrol *selection bias*, variabel interest kesehatan BPJS Non-PBI konsisten signifikan menurunkan probabilita keterpilihan dinasti politik. Marginal effect dari regresi heckprobit menunjukkan bahwa probabilita dinasti politik terpilih 0,12% lebih rendah untuk setiap kenaikan 1% BPJS Non-PBI. Argumentasi mengapa arahnya negatif adalah iuran kepesertaan BPJS Non-PBI dibayarkan oleh pemberi kerja atau secara mandiri membayar iuran sendiri, oleh karenanya masyarakat tidak merasakan peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai.

Sedangkan variabel interest infrastruktur konsisten signifikan meningkatkan probabilita keterpilihan dinasti politik. *Marginal effect* dari regresi heckprobit menunjukkan bahwa probabilita dinasti politik terpilih 0,54% lebih tinggi untuk setiap kenaikan 1% BPJS Non-PBI. Hal ini mengindikasikan bahwa politik perbaikan kondisi jalan efektif meningkatkan

elektabilitas dinasti politik. Walaupun masyarakat tidak bisa membedakan jalan mana yang merupakan otoritas pemerintah pusat atau daerah, namun masyarakat menjadikan kondisi jalan sebagai alat retrospective economic voting pada dinasti politik.

Dari aspek kontrol *selection bias* yaitu variabel dummy keberadaan pendahulu dinasti politik yang masih berkuasa (*DinastiContinue*) menunjukkan bahwa adanya anggota keluarga dinasti politik yang masih berkuasa berpengaruh sangat erat pada keterpilihan dinasti politik pada pilkada.

Adanya anggota keluarga yang masih menjabat dalam kekuasaan dapat memberikan akses ke sumber daya publik sehingga memberikan keuntungan elektoral bagi kandidat dinasti politik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dal Bo, *et al* (2009) dimana adanya hubungan antara anggota keluarga dinasti politik yang masih berkuasa dengan probabilita memiliki anggota keluarga lainnya yang duduk dalam kekuasaan politik di kemudian hari.

Robustness Check digunakan untuk mendapatkan keyakinan atas model bahwa penelitian ini konsisten dalam menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, robustness check dilakukan dengan memberikan alternatif model dengan memecah variable interest seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.

Hasil estimasi *robustness checks* menunjukkan bahwa estimasi konsisten dengan model utama, yakni *interest variable* kesehatan BPJS Non-PBI konsisten arahnya negatif dan signifikan menurunkan probabilita

keterpilihan dinasti politik. Sedangkan *interest variable* infrastruktur jalan mantap signifikan meningkatkan probabilita keterpilihan dinasti politik.

## KESIMPULAN

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji apakah variabel kesehatan dan variabel infrastruktur berkorelasi pada keterpilihan dinasti politik di pilkada Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2017-2020. Penelitian ini menguji dengan menggunakan data rata-rata 5 tahun sebelum pilkada 2017, 2018 dan 2020 dan sample yang digunakan adalah 508 Kabupaten/Kota yang mengikuti pilkada.

Penelitian ini menggunakan model regresi probit dan model regresi heckprobit untuk menguji apakah probabilita keterpilihan dinasti politik dipengaruhi oleh variabel kesehatan yang diprosikan oleh kepesertaan jaminan kesehatan milik pemerintah dan variabel infrastruktur yang diprosikan kondisi jalan mantap.

Estimasi regresi probit yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki resiko *selection bias*. Dari uji signifikansi rho secara statistik terbukti bahwa  $\rho$  menolak hipotesis 0 sehingga lebih cocok menggunakan model seleksi Heckprobit.

Hasil kontrol *selection bias* menunjukkan bahwa *interest variable* kesehatan yaitu BPJS Non-PBI signifikan menurunkan probabilita keterpilihan dinasti politik. Arah negatif ini merupakan bentuk *retropective economic voting* pada dinasti politik, dimana setiap kenaikan 1% kepesertaan BPJS Non-PBI menurunkan probabilita keterpilihan dinasti politik. Hal ini disebabkan voters menganggap

pemerintah tidak memiliki peran dalam penyediaan fasilitas kesetahan yang gratis karena yang membayar iuran kepesertaan BPJS Non-PBI adalah pemberi kerja atau harus membayar secara mandiri.

Sedangkan *interest variable* infrastruktur berupa kondisi jalan mantap signifikan meningkatkan probabilita keterpilihan dinasti politik. Hal ini mengindikasikan bahwa politik perbaikan kondisi jalan efektif meningkatkan elektabilitas dinasti politik dan masyarakat menjadikan kondisi jalan sebagai alat *retrospective economic voting* pada dinasti politik.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepesertaan BPJS Non-PBI dan Kondisi Jalan Mantap efektif sebagai alat *retropective economic voting* dalam arah yang bertolak belakang. Voters "menghukum" karena menganggap tidak adanya kehadiran pemerintah dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang gratis. Sebaliknya Voters memberikan kompensasi ketika merasakan kondisi jalan mantap.

Adanya "hukuman" bagi dinasti politik mengindikasikan voters kecewa dengan iuran yang telah dibayarkan tidak sebanding dengan fasilitas kesehatan yang dirasakan. Untuk itu, diperlukan perbaikan dalam skema perlindungan kesehatan yang dapat memberikan fasilitas kesehatan yang memadai.

Sementara itu, perbaikan jalan raya efektif untuk meningkatkan probabilitas kemenangan dinasti politik dalam pilkada. Namun demikian perbaikan yang dilakukan tidak signifikan dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaktepatan alokasi (perbaikan jalan hanya pada area kediaman dinasti politik berada) dan ketidakefisienan perbaikan jalan (jalan yang sering dilalui kendaraan berat perbaikannya hanya tambal sulam, sedangkan jalan di perumahan perbaikan jalan di beton) untuk menarik perhatian publik dalam rangka meningkatkan elektabilitas.

Kebijakan perbaikan jalan raya hendaknya efektif dan memberikan skala prioritas dengan memperhitungkan dampak lanjutan (*multiplier effect*) meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (seperti akses menuju fasilitas kesehatan/fasilitas pendidikan/pasar, akses utama yang menghubungkan antar kelurahan/kecamatan/kota, dan memberikan akses untuk membuka daerah terpencil).

## DAFTAR PUSTAKA

- Asako, Y., Iida, T., Matsubayashi, T. & Ueda, M. (2015) Dynastic Politicians: Theory and Evidence from Japan, *Japanese Journal of Political Science*, 16, pp. 5-32.
- Aspinall E. & As'ad M.U. (2016) Understanding Family Politics: Successes and Failures of Political Dynasties in Regional Indonesia. *South East Asia Research*. 24(3), pp. 420-435.
- Besley, T. & Case, A. (1995) Incumbent Behavior: Vote Seeking, Tax Setting and Yardstick Competition. *Am. Econ. Rev.* 85 (1), pp. 25-45.
- Besley, T. & Smart, M. (2007) Fiscal Restraints and Voter Welfare. *J. Publ. Econ.* 91 (3), pp. 755-773.
- Besley, T. & Reynal-Querol, M. (2015) The Logic of Hereditary Rule: Theory and Evidence. Mimeo, LSE.
- BPJS Kesehatan, (2020) Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Edisi Tahun 2020.
- Bragança, A., Ferraz, C. & Rios, J. (2015) Political Dynasties and The Quality of Government.
- Buehler, M. (2013) Married With Children. *Inside Indonesia* 112: Apr-Jun 2013.
- Dal Bo, E., Dal Bo, P. & Snyder, J. (2009) Political Dynasties, *The Review of Economic Studies*, 76, pp 115-142.
- Daniele, G., Romarri A. & Vertier, P. (2021) Dynasties and policymaking, *Journal of Economic Behavior and Organization*, 190, pp. 89-110.
- Fadhillah, D. N., Ramadhan, F. & Dewa, T. T. (2020) Riset Nagara Institute: Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Nagara Institute.
- Firdaus, F.R., Adakah Larangan Politik Dinasti di Indonesia? <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-larangan-politik-dinasti-di-indonesia-lt61d2a96ed01b1>
- Fiva, J.H. & Smith, D.M. (2016). 'Political dynasties and the incumbency advantage in party-centered environments', Working Paper Series No. 5757, CESifo.
- Fowler, Anthony, & Andrew B. Hall (2014) Disentangling the Personal and Partisan Incumbency Advantages: Evidence from Close Elections and Term Limits. *Quarterly Journal of Political Science* 9 (4), pp. 501-31.
- George, S.E. & Ponattu, D. (2018) How Do Political Dynasties Affect Economic Development? Theory and Evidence from India.
- Geys, B. & Smith, D.M. (2017) Political Dynasties in Democracies: Causes Consequences and Remaining Puzzles, *The Economic Journal*, 127, pp. 446-454.
- Kenawas. Y.C. (2015) The Rise of Political Dynasties in a Democratic Society. Arryman Fellow Symposium, Juni 2015.
- Kiewiet D., Roderick. (2000) Economic Retrospective Voting and Incentives For Policymaking, *Electoral Studies* 19, pp. 427-444.

- Kurtz II, Donn M. (1989) The Political Family: A Contemporary View, *Sociological Perspectives*, Vol. 32, No. 3, pp. 331-352.
- Leigh, A. & McLeish, M. (2009) Are state elections affected by the national economy? Evidence from Australia. *Econ. Rec.* 85 (269), pp. 210–222.
- Lewis-Beck. M.S (1988) *Economics and Elections: The Major Western Democracies*. Ann Arbor University of Michigan Press
- Lewis-Beck, M.S. & Paldam, M,. (2000) Economic Voting: An Introduction, *Electoral Studies* 19. pp. 113-121.
- Lewis-Beck, M.S. & Stegmaier, M,. (2000) Economic Determinants of Electoral Outcomes, *Annual Review of Political Science*, 3, pp. 183-219.
- Lewis-Beck, M.S.& Stegmaier, M,. (2007) *Economic Models of Voting*, The Oxford Handbook of Political Behavior.
- Mendoza, R.U., Beja, E.Jr., Venida, V,S. &Yap, D.B. (2012) Inequality in Democracy: Insight From An Empirical Analysis of Political Dynasties In The 15th Philippine Congress, MPRA Paper No. 40104.
- Nugroho, Y., Kenawas, Y.C. & Syarief. S.S. (2021) ISEAS Perspective 2021/5 How the 2020 Pilkada Reflected Major Structural Flaws in Indonesian Politics. ISEAS Yusof Ishak Institute
- Oliver, J.E & Ha, S.E. (2007) Vote Choice in Suburban Elections, *American Political Science Review*, Vol. 101, No. 3, pp. 393-408.
- Parker, G.R. (1996) *Congress and The Rent-Seeking Society*. Ann harbor, MI: University of Michigan Press.
- Persson, T. & Tabellini, G. (2000) *Political Economics: Explaining Economic Policy*. MIT press, Massachusetts.
- Powell, G.B. & Whitten, G. (1993) A Cross-National Analysis of Economic Voting Taking Account of The Political Context. *American Journal of Political Science* 37, pp. 391–414.
- Purwaningsih, T. & Widodo, B.E.C. (2020) The Interplay of Incumbency, Political Dynasty and Corruption in Indonesia: Are Political Dynasties The Cause of Corruption in Indonesia?, *Unisci Journal* No. 53, pp. 157-176.
- Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada. (2022) Menyoal Pemeliharaan Rutin Jalan. <https://pustral.ugm.ac.id/2022/05/30/menyoal-pemeliharaan-rutin-jalan/>
- Querubin, P. (2016) Family and Politics: Dynastic Persistence in The Philippines. *Quarterly Journal of Political Science*, 11, pp. 151-181.
- Rossi, M.A. (2017) Self-perpetuation of Political Power, *Economic Journal*, vol. 127(605), pp. F455–73.
- Rumayya, Rammohan, A., Purwono, R. & Harymawan, I. (2020) The Local Economy and Re-election of Incumbent District Leaders in Indonesia, *Heliyon* 6, e04098.
- Salmon, P. (1987) Decentralisation as an incentive scheme. *Oxf. Rev. Econ. Pol.* 3 (2), pp. 24–43.
- Setyaningrum, D. & Saragih, H.A. (2019) Political Dynasties and the Moderating Role of Good Public Governance, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8, pp. 135-144.
- Simanjuntak. D. (2021) Direct Elections, Patronage, and The Failure of Party Cadre-ship: Dynastic Politics in Indonesia. Heinrich Böll Stiftung Southeast Asia Regional Office.
- Smith, D.M. (2012) Succeeding in Politics : Dynasties in Democracies, UC San Diego.
- Sutisna. A. (2017) The Proliferation Symptoms of Political Dynasties in Banten Under The Era of Governor Ratu Atut Chosiyah's. *Diponegoro Law Review*, Volume 02 Number 02
- Van Coppenolle, B. (2017) 'Political dynasties in the UK House of Commons: The null effect of narrow electoral selection', *Legislative Studies Quarterly*, forthcoming.
- Wolfers, J. (2007) Are Voters Rational? Evidence from Gubernatorial Elections. Mimeo, University of Pennsylvania.